

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Anita Theresia, 2016, *Dinamika Asas Keseimbangan Kepentingan dalam Perkembangan; Pengaturan Perlindungan Nasabah Bank di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Anita Theresia, 2014, *Hukum Perbankan; Analisis Independensi Bank Indonesia, Bank Syariah, dan Prinsip Menegnal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Anita Theresia, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Djafar Muhammad dan Eka, 2011, *Kejahatan Di Bidang Perpajakan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Djumhana Muhamad, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Fuady Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gazali Djoni dan Usman Rachmadi, 2010, *Hukum Perbankan*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Ilyas B. Wirawan dan Richard, 2010, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Istanto Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung
- Sumardjono SW. Maria, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Sutedi Adrian, 2007, *Hukum Perbankan; Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta

Soekanto Soerjono dan Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

**Jurnal:**

Dewi Restu Mangeswuri, 2017, *Keterbukaan Informasi Keuangan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak*, Buletin APBN, edisi X Vol.II. Juni 2017, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

**Internet:**

Direktorat Jenderal pajak, *Materi Sosialisasi Perppu No. 1 Tahun 2017*, <http://www.pajak.go.id/content/materi-sosialisasi-perppu-no-1-tahun-2017>, diakses 15 September 2017

Darussalam, B. Bawono Kristiaji dan Deborah, *Akses Data Perbankan untuk Tujuan Perpajakan; Keseimbangan antara Hak-Hak Wajib Pajak dan Penggalian Potensi Pajak-Studi Komparasi*, <https://ddtc.co.id/uploads/pdf/Working-Paper-Akses-Data-Perbankan-Untuk-Tujuan-Perpajakan-Keseimbangan-Antara-Hak-Hak-Wajib-Pajak-Dan-Penggalian-Potensi-Pajak-Studi-Komparasi>, diakses 20 September 2017

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, LN. No. 85 Tahun 2007 TLN No. 4740;

Undang-undang No. 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-undang, LN. No. 190 Tahun 2017 TLN No. 6112;

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LN. No. 182 Tahun 1998 TLN No. 3790;

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, LN. No. 133 Tahun 2008 TLN No. 4893;

Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, LN. No. 95 Tahun 2017 TLN No. 6051

Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2017 pada 31 Mei 2017 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Berita Negara No. 837 Tahun 2017;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-16/PJ/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan;

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, LN No. 152 Tahun 2000 TLN No. 3998;